BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

3.1.1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya

Penelitian ini mengenai implementasi kebijakan Perda No. 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya yang dibuat oleh pemerintah Kota Bandung dimana Perda ini sebagai landasan hukum yang mengikat untuk menjaga atau melestarikan bangunan cagar budaya. mengingat kawasan dan bangunan cagar budaya mempunyai peranan yang sangat peting bagi pengembangan sejarah, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Bagi Kota Bandung kawasan dan bangunan cagar budaya ini bahkan merupakan asset yang harus senantiasa dijaga, dipelihara, dilindungi dan dikelola dengan sebaik-baiknya.

Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah No 19 Tahun 2009 dengan maksud agar terkelolanya bangunan-bangunan cagar budaya dari kerusakan maupun dari kepunahan adapun tujuan dari Perda ini adalah sebagai berikut :

a. Mempertahankan keaslian kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
b. Memulihkan keaslian kawasan dan/atau bangunan yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;

c. Melindungi dan memelihara kawasan dan/atau bangunan cagar budaya dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun proses alam;
d. Mewujudkan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya sebagai kekayaan budaya untuk dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan dan citra positif Daerah dan tujuan wisata.
(Perda No. 19 Tahun 2009 Kota Bandung)

Bangunan cagar budaya itu sendiri merupakan bangunan sejarah yang perlu kita lindungi dan dilestarikan untuk mengembangkan citra positif Bandung sebagai Kota tujuan wisata. dengan adanya Perda No.19 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya diharap Pemerintah Kota Bandung dapat mengimplementasikan isi dari ketentuan-ketentuan yang terkandung didalam kebijakan tersebut. Dengan keberadaan Perda ini mampu mempertegas dan memfasilitasi didalam pengelolaan bangunan cagar budaya di Kota Bandung.

3.1.2 Sejarah Bangunan Cagar Budaya di Kota Bandung

Sejarah sebuah Kota tidak hanya bisa ditelusuri dari perjuangan masyarakatnya. Selain melalui kondisi geologi, masih banyak saksi bisu lainnya yang bisa menceritakan perjalanan masa lalu sebuah Kota, terutama ketika Kota tersebut memasuki masa jaya.

Kota Bandung termasuk salah satu Kota di Indonesia yang paling beruntung karena masih memiliki salah satu saksi sejarah masa lalunya yang bisa dibaca lewat bangunan-bangunan tua dengan berbagai langgam arsitekturnya. Melalui salah satu

kekayaan itu, setiap orang bisa menelusuri perjalanan sejarah Kota dan masyarakat Bandung, tergantung dari kepentingannya.

Dari segi arsitektur, Bandung pernah dijuluki sebagai laboratorium arsitektur paling lengkap karena memiliki begitu banyak kekayaan arsitektur yang hingga kini menjadi sumber inspirasi dan bahan penelitian yang tak habis-habisnya untuk digali. Berbagai bangunan tua bukan hanya mampu menceritakan bagaimana awal Kota ini dibangun. Tetapi, dari sudut pandang lain-terutama dalam hubungan dengan peringatan 400 tahun VOC-bisa diketahui bagaimana kuku-kuku penjajah mulai mencengkeram daerah yang selama ini dijuluki Bumi Parahyangan untuk mengeksploitir sumber daya alam dan manusianya.

Dataran Tinggi Priangan dijadikan salah satu wilayah perkebunan sejak tahun 1870 dengan pusat dan sekaligus tempat tinggal mereka di Kota Bandung. Cikal bakal pembukaan areal perkebunan tersebut masih bisa disaksikan lewat bangunan tua yang kini dijadikan pusat pemerintahan Kota Bandung.

Gedung tersebut dibangun tahun 1819 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Der Cappelen atas usul Dr De Wilde yang saat itu jadi Asisten Residen Priangan (Balai Kajian Jarahnitra, 1998). Bangunan tersebut sebelumnya merupakan gudang tempat menyimpan kopi. Karena bentuk atapnya datar, masyarakat menjuluki gedung tersebut gedong papak. Papak artinya datar. Akan tetapi, jika ditilik dari usianya, umur bangunan pendopo Kabupatan Bandung jauh lebih tua. Bangunan yang merupakan tempat tinggal bupati-bupati Bandung dan kini dijadikan tempat kediaman resmi Wali Kota Bandung itu didirikan Bupati RAA Wiranatakusumah II

pada tahun 1810. Saat itu bertepatan dengan kepindahan ibu Kota kabupaten dari Krapyak ke Kota Bandung.

Masa keemasan pembangunan fisik Kota Bandung ditandai dengan maraknya pembangunan gedung-gedung modern sejak akhir abad ke-19. Masa itu ditandai dengan dipindahkannya ibu Kota Priangan dari Cianjur ke Bandung pada tahun 1864. Namun, dampak positif kemajuan sosial-ekonomi Kota ini barulah memperlihatkan perkembangan yang luar biasa sejak direncanakan sebagai ibu Kota Hindia Belanda, menggantikan Batavia yang sanitasinya dinilai kurang mendukung. Usul pemindahan ibu Kota tersebut disampaikan HF Tillema (1916) dan disetujui Gubernur Jenderal Limburg Van Stirum.

Dari segi arsitektur, era ini ditandai dengan ditinggalkannya langgam arsitektur Indische Empire Stijl sebagai bentuk bangunan yang paling hebat pada masa sebelumnya. Salah satu bangunan dengan langgam gaya arsitektur tersebut bisa disaksikan lewat Gedung Pakuan yang kini dijadikan tempat kediaman resmi Gubernur Jawa Barat (Jabar) di Jalan Oto Iskandar Dinata dan Markas Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Bandung di Jalan Merdeka.

Kota Bandung mengalami penataan yang lebih komprehensif sejak tahun 1920-an. Ditandai dengan pembangunan gedung-gedung yang dilakukan bersamaan dengan rencana pemindahan ibu Kota telah mengundang perhatian para perancang Kota dan bangunan. Salah seorang di antaranya perancang terkemuka, Ir Thomas Karsten, yang merancang Bandung sehingga gagasannya kemudian dikenal dengan “Plan Karsten”. Dalam mengantisipasi perkembangan Kota ia mengusulkan gagasan

perluasan wilayah Kota untuk 25 tahun ke depan dari semula 2.835 ha (1930) menjadi 12.758 ha yang diperuntukkan 750.000 penduduknya. Gagasan ini diperlukan untuk tetap mempertahankan Bandung sebagai Kota Taman yang membutuhkann ruang terbuka yang cukup luas.

Selain dikenal sebagai Kota Taman yang kemudian melahirkan berbagai sanjungan karena kecantikannya, di bidang arsitektur, Kota Bandung mewariskan kekayaan berbagai langgam arsitektur. Lewat bangunan-bangunan tua Gedung Sate yang hingga kini tetap menjadi landmark Kota Bandung, kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) yang berusaha memadukan gaya arsitektur modern dan tradisional, Kota ini masih menyimpan kekayaan gaya arsitektur art deco.

Seni kebangkitan art deco di Kota Bandung mencapai puncaknya pada tahun 1920-an. Salah satu di antaranya adalah Gedung Bumi Siliwangi yang kini dijadikan Kantor Rektorat Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Gedung yang hampir menyerupai kapal laut itu merupakan karya perancang Prof Wolf P Schoemaker. Bangunan ini pada awalnya merupakan vila milik DW Barrety yang dipersembahkan untuk istrinya.

Tahun 1964, gedung tersebut dibeli pemerintah dan kemudian digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG), cikal bakal Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung. Langgam gaya arsitektur art deco yang tak kurang jumlahnya bisa dijumpai di sepanjang Jalan Braga, salah satu jalan paling bergengsi di Kota Bandung, di samping langgam gaya arsitektur lainnya. Maklum, pada saat itu di Bandung terdapat lebih dari 70 perancang

bangunan. Bahkan, tak kurang dari Ir Soekarno, Presiden RI pertama, sempat memberi warna dan kekayaan arsitektur bangunan di Kota ini. Bangunannya dicirikan dengan atap bertingkat dua dan bagian atasnya terdapat semacam gada.

3.1.3 Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dari Pemerintah Kota Bandung yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Dinas ini terdiri dari 4 Bidang yaitu Bidang Objek Wisata, Bidang Sarana Wisata, Bidang Pemasaran, Bidang Seni Budaya dan 1 Sekretariat.

Setiap Bidang dibagi kedalam 2 Seksi yaitu untuk Bidang Objek Wisata dibagi menjadi Seksi Pembinaan dan Pengembangan Objek Wisata. Bidang Sarana Wisata dibagi menjadi Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sarana Wisata. Bidang Pemasaran dibagi menjadi Seksi Promosi dan Kerjasama Wisata. Bidang Seni Budaya dibagi menjadi Seksi Kesenian dan Kebudayaan. Sedangkan untuk Sekretariat dibagi menjadi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan dan Program. Ditambah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Padepokan Seni.

Tabel 3.1 Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwsata Kota Bandung Berdasarkan Golongan

NO	Golongan	Jumlah (Orang)
1.	IV	10
2.	III	32
3.	II	11
4.	I	4
	Jumlah	57

Sumber: Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 2013

Berdasarkan data aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung berdasarkan golongan ada 4 golongan yaitu golongan IV sekitar 10 orang, golongan III ada 32 orang, gologan II ada 11 Orang dan golongan 1 ada 4 orang jumlah data aparatur berdasarkan golongan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ada 57 orang.

Tabel 3.2 Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwsata Kota Bandung Berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Jumlah Orang
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Seksi	8
5	Kepala Sub Bagian	2
6	Kepala UPT	1
7	Kepala Sub Bag TU UPT	1
8	Pelaksana	40
	Jumlah	58

Sumber: Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 2013

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung menurut jabatanya terdiri dari Kepala Dinas 1 orang yang bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang kebudayaan dan pariwisata, Sekretaris 1 orang yang bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Bidang terdiri dari 4 orang yang dimana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Dinas berdasarkan di bidang masing-masing, Kepala Sub bagian terdiri dari 2 orang dimana bertugas membantu sekretaris, Kepala Upt terdiri dari 1 orang dan di bawahnya ada Kepala Sub Bag TU UPT. Dan pelaksana terdiri dari 40 orang dimana 40 orang tersebut adalah aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang tugasnya dibawah wewenang kepala sesuai dengan bidang masing-masing di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Jumlah aparatur keseluruhan yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebanyak 58 orang.

Tabel 3.3 Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwsata Kota Bandung Berdasarkan Pendidikan

NO	Pendidikan	Jumlah Orang
1	S2	13
2	S1	23
3	D3	1
4	SMA	17
5	SMP	4
	Jumlah	58

Sumber: Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 2013

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ada 58 orang berdasarkan tingkat pendidikan yang berbeda S2 ada 13 orang, S1 23 orang, D3 1 orang, SMA 17 orang dan SMP 4 orang ini menunjukan bahwa aparatur di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat memperhatikan pendidikan agar aparatur dapat berkualitas dalam menjalankan tugas pokok sesuai dengan bidang yang sudah ditentukan.

3.1.3.1. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2009–2013 adalah: **”MEMANTAPKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA SENI BUDAYA DAN TUJUAN WISATA TAHUN 2013”**

Visi di atas mengandung pengertian bahwa Kota Bandung sebagai Kota Seni Budaya (Puseur Budaya) dan Kota Tujuan Wisata saat ini merupakan upaya yang secara intens di lakukan pada periode 2004 – 2008 akan dan perlu dimantapkan keberadaannya pada periode 2009 – 2013. Sehingga Kota Bandung ke depan benar-benar menjadi Kota Seni Budaya dan Tujuan Wisata yang berdaya saing tinggi sejajar dengan Kota-Kota lain di dalam dan luar negeri yang selama ini telah menunjukkan kiprahnya di bidang Budaya dan Pariwisata.

Misi dari Dinas Kebudayaan dan Parwisata Kota Bandung adalah:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kepariwisataan Yang *Profesional*, Berkarakteristik Sunda Dan Berwawasan Global;

2. Meningkatkan pelestarian, pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dan kesenian;
3. Mengembangkan industri pariwisata yang *kreatif*, *inovatif* dengan memperhatikan terlaksananya sapta pesona;
4. Meningkatkan destinasi pariwisata Kota yang berdaya saing tinggi baik pada tingkat *regional*, nasional maupun *internasional*;
5. Meningkatkan pemasaran melalui kemitraan dan kerjasama budaya dan pariwisata dengan pemangku kepentingan dan/atau Kab/Kota/negara lain.

3.1.3.2 Deskripsi Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

Berdasarkan Perda 13 Tahun 2007, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah sebagai berikut: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang kebudayaan dan Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata.
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan Pariwisata.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwista yang meliputi kebudayaan dan kesenian, sarana wisata, objek wisata dan pemasaran wisata.
4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh WaliKota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan berdasarkan Peraturan WaliKota Bandung Nomor: 475 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung (Dalam hal ini DISBUDPAR Kota Bandung) adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

1) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis lingkup kebudayaan dan kesenian, sarana wisata, objek wisata dan pemasaran pariwisata.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan
   kesenian, sarana wisata, objek wisata dan pemasaran pariwisata;
c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang kebudayaan dan kesenian, sarana wisata, objek wisata dan pemasaran pariwisata.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan WaliKota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

2. Sekretariat

1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lingkup kesekretariatan.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan dan penyusunan rencana kesekretariatan;
b. Pelaksanaan pelayanan administratif kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan program Dinas.
c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang.
d. Pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian kegiatan kesekretariatan Dinas.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup umum dan kepegawaian.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan Dinas

c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutas, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

4. Sub Bagian Keuangan dan Program

1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan program.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program Dinas;

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan vahan dan koordinasi penyusunan rencana anggaran Dinas, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan

c. Pelaksanaan pengelolaan program Dinas meliputi penyusunan vahan dan koordinasi penyusunan rencana dan prgoram kegiatan Dinas serta fasilitasi pengkoordinasian penyusunan laporan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup administrasi keuangan dan program Dinas.

5. Bidang Kebudayaan dan Kesenian

1) Bidang Kebudayaan dan Kesenian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kebudayaan dan kesenian.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan dan Kesenian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program lingkup kebudayaan dan kesenian;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup kebudayaan dan kesenian;
c. Pelaksanaan lingkup kebudayaan dan kesenian;
d. Pengkajian rekomendasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perfilman serta pengiriman dan penerimaan misi kesenian
e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kebudayaan dan kesenian.

6. Seksi Kebudayaan

1) Seksi Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebudayaan dan Kesenian lingkup kebudayaan.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kebudayaan mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kebudayaan.
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kebudayaan.
c. Pelaksanaan lingkup kebudayaan yang meliputi kegiatan pelestarian, pengelolaan dan pemeliharaan sejarah, museum, kepurbakalaan, bahasa, sastra dan penanaman nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, fasilitasi

kerjasama dan kemitraan bidang kebudayaan, serta pengembangan jaringan informasi kebudayaan.

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perfilman
e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kebudayaan.

7. Seksi Kesenian

1) Seksi Kesenian mempunya tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebudayaan dan Kesenian lingkup kesenian.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesenian mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kesenian.
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kesenian.
c. Pelaksanaan lingkup kesenian yang meliputi pembinaan, peningkatan dan pengembangan apresiasi seni tradisional dan modern. Revitalisasi dan kajian seni, pembinaan, fasilitasi kerja sama dan pengembangan kesenian serta fasilitasi pemberian penghargaan dibidang kesenian.
d. Pembinaan, pengewasan dan penyiapan bahan rekomendasi penyelenggaraan pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian
e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kesenian.

8. Bidang Sarana Wisata

1) Bidang Sarana Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian lingkup Sarana Wisata.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Wisata mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan sarana wisata dan pengembangan sarana wisata.
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan sarana wisata dan pengembangan sarana wisata.
c. Pelaksanaan lingkup pembinaan sarana wisata dan pengembangan sarana wisata.
d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan sarana wisata dan pengembangan sarana wisata.

9. Seksi Pembinaan Sarana Wisata

1) Seksi Pembinaan Sarana Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana Wisata lingkup Pembinaan Sarana Wisata.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Sarana Wisata mempunyai fungsi;

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan sarana wisata.
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan sarana wisata.
c. Pelaksanaan lingkup pembinaan sarana wisata yang meliputi inventarisasi potensi sarana wisata, dan pembinaan pengelolaan sarana wisata.
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan sarana wisata.

10. Seksi Pengembangan Sarana Wisata

1) Seksi Pengembangan Sarana Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana Wisata lingkup pengembangan sarana wisata.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Sarana Wisata mempunyai fungsi;

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengembangan sarana wisata.
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan sarana wisata.
c. Pelaksanaan lingkup pengembangan sarana wisata yang meliputi pembinaan pengembangan sarana wisata.
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan sarana wiata.

11. Bidang Objek Wisata

1) Bidang Objek Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Objek Wisata.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Objek Wisata mempunyai fungsi;

a. Penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan objek wisata dan pengembangan objek wisata.
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan objek wisata dan pengembangan objek wisata.
c. Pelaksanaan lingkup pembinaan objek wisata dan pengembangan objek wisata.

d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan objek wista dan pengembangan objek wisata.

12. Seksi Pembinaan Objek Wisata

1) Seksi Pembinaan Objek Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Objek Wisata lingkup pembinaan objek wisata.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Objek Wisata mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan objek wisata;
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan objek wisata;
c. Pelaksanaan lingkup pembinaan objek wisata yang meliputi inventarisasi objek wisata, pembinaan dan pengelolaan objek wista.
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan objek wisata.

13. Seksi Pengembangan Objek Wisata

1) Seksi Pengembangan Objek Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Objek Wisata lingkup Pengembangan Objek Wisata.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Objek Wista mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengembangan objek wisata.
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan objek wisata.
c. Pelaksanaan lingkup pengembangan objek wisata yang meliputi melaksanakan kajian dan pengembangan objek wisata.
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan objek wista.

14. Bidang Pemasaran Pariwisata

1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengwasan dan yustisi pemasaran pariwisata.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program lingkup promosi pariwista dan kerjasama wisata.
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup promosi pariwisata dan kerjasama Wisata.
c. Pelaksanaan lingkup promosi pariwisata dan kerjasama wisata.
d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup promosi pariwisata dan kerjasama wisata.

15. Seksi Promosi Pariwisata

1) Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemasaran Pariwisata lingkup promosi pariwisata.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi Pariwisata mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup promosi pariwista.
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup promosi pariwista.
c. Pelaksanaan lingkup promosi pariwisata yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan pameran/event dan sarana pemasaran wisata, dan penyediaan informasi pariwisata.

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup promosi pariwisata.

16. Seksi Kerjasama Wisata

1) Seksi Kerjasama Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemasaran Pariwisata lingkup kerjasama wisata.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerjasama Wisata mempunyai fungsi;

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kerjasama wisata.

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kerjasama wisata.

c. Pelaksanaan lingkup kerjasama wisata yang meliputi fasilitasi kerjasama dan kemitraan dalam melaksanakan pengembangan dan promosi pariwisata.

3.1.3.3 Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

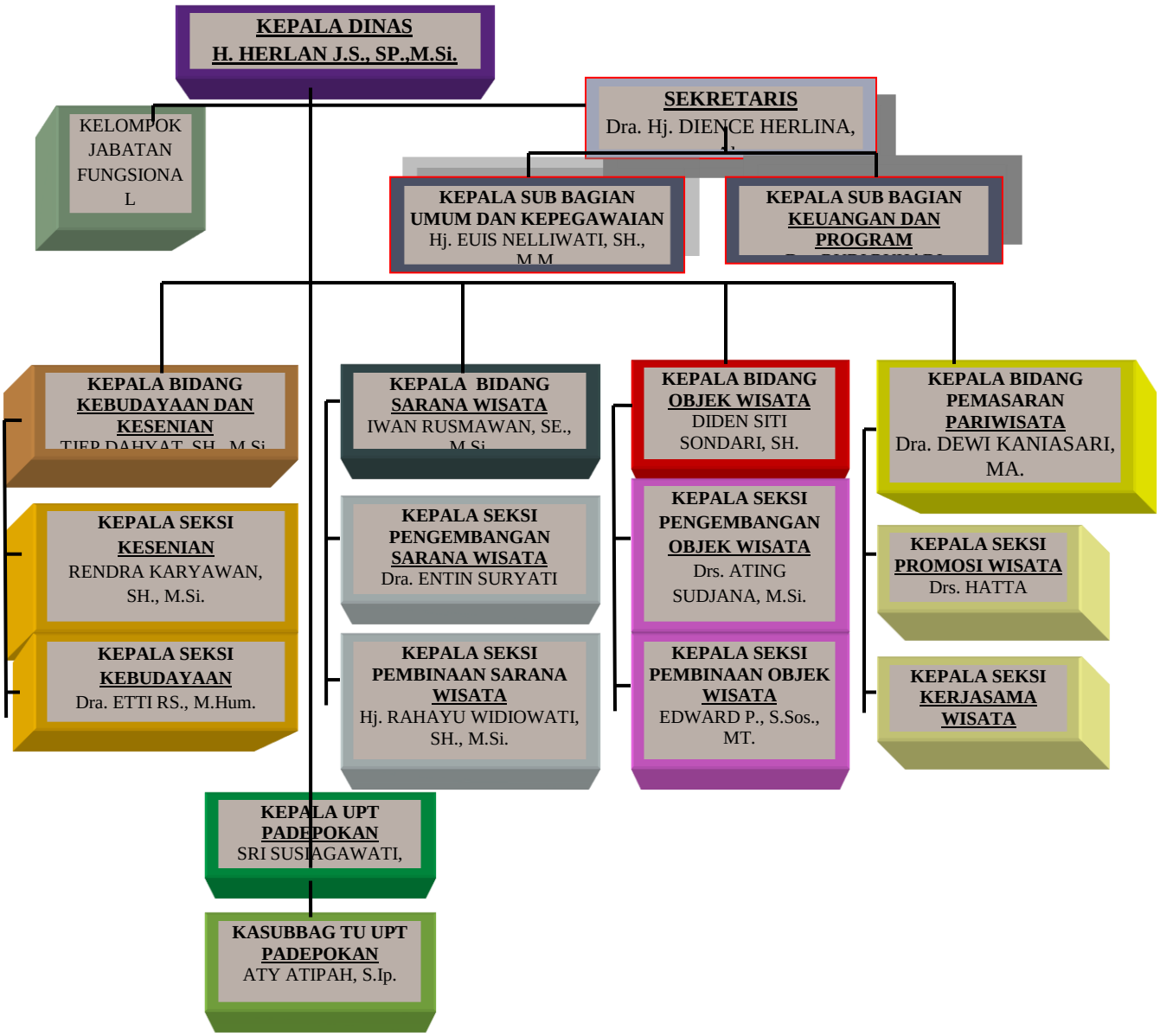
Berdasarkan Perda 13 Tahun 2007, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Sedangkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsinya ditentukan dengan Peraturan WaliKota Bandung Nomor: 475 Tahun 2008. Pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah melakukan pembinaan dan pengembangan bidang-bidang kebudayaan dan kepariwisataan.

1. Sekretariat melaksanaan pelayanan administratif kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan program Dinas, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang serta melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian kegiatan kesekretariatan Dinas.

2. Bidang Objek Wisata melaksanakan pembinaan objek wisata yang sudah ada seperti musieum, kebun binatang, tempat hiburan, sedangkan pengembangan objek wisata mencari alternatif yang bisa dijadikan objek wisata baru seperti wisata belanja, wisata kuliner dan wisata air Cikapundung.
3. Bidang Sarana Wisata melaksanakan pembinaan sarana wisata yang sudah ada seperti hotel-hotel dan restouran-restouran, sedangkan pengembangan sarana wisata antara lain dengan merekomendasikan pendirian hotel-hotel dan restouran-restouran baru serta memantau mobilitas masyarakat pengguna sarana wisata.
4. Bidang Pemasaran melaksanakan promosi dengan mengadakan pameran-pameran, merekomendasikan acara-acara untuk menarik wisatawan, sedangkan kerjasama wisata dilakukan dengan menggaet pihak-pihak swasta seperti agen perjalanan wisata untuk bekerjasama mempromosikan Kota Bandung.
5. Bidang Seni Budaya melaksanakan pengembangan dan pembinaan kesenian dan kebudayaan yang ada di Kota Bandung terutama kesenian dan kebudayaan tradisional dengan memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat yang berkecimpung di bidang seni budaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Padepokan adalah salah satu gedung yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dapat digunakan untuk berbagai macam acara-acara pementasan kesenian atau acara seremonial, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandung atau acara-acara masyarakat umum.

3.1.3.4 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung



3.2 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan untuk mengemukakan tata kerja dalam suatu kegiatan Penelitian penulis menggunakan metode penulisan deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisa yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan atau fenomena yang nyata. Peneliti menggunakan penulisan Deskriptif karena memungkinkan menjadi pengamat, bukan sebagai penguji yang mengakibatkan perspektif peneliti tidak tersaring. Dalam hal ini peneliti bertindak sekaligus sebagai instrumen penelitian, mengikuti asumsi-asumsi kultural dalam upaya mencapai wawasan imajinatif ke dalam dunia sosial informan dan peneliti diharapkan fleksibel dan reflektif tetapi tetap mampu mengatur jarak. Hal ini sejalan dengan pendapat Mohammad Nazir dalam bukunya Metode Penelitian Sosial yang mendefinisikan metode deskriptif, sebagai suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 1998:63).

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan., untuk itu dalam meneliti Implementasi kebijakan Perda No.19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya di Kota Bandung ini peneliti menggunakan metode kualitatif.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, karena pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2005:1).

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak (Sugiyono, 2005:3).

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penulisan. Metode yang digunakan untuk menunjang Penelitian ini sebagai berikut :

1. **Studi Pustaka**

Studi Pustaka, yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan Implementasi kebijakan Perda No.19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya di Kota Bandung studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

2. Studi Lapangan

Penelitian dengan studi lapangan dilakukan dengan melalui observasi dan wawancara dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, serta studi dokumentasi.

a. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Karena merupakan proses pembuktian, maka bisa saja hasil wawancara sesuai atau berbeda dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya.

b. Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi

dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

c. Dokumentasi adalah informasi yang bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali infromasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

3.2.2. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive yaitu dengan menentukan informan berdasarkan tujuan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk mendapatkan data yang obyektif. Penentuan informan secara purposive ini dilakukan baik kepada aparatur maupun kepada masyarakat. Selanjutnya yang dijadikan informan dari purposive dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Bidang Seni Dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang mempunyai kewenangan sebagai Pembina dan pengawas dalam penyelenggaraan hal seni dan budaya.
2. Kepala Seksi Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang merangkap sebagai anggota tim cagar budaya Kota Bandung yang mempunyai kewenangan secara khusus dalam mengatur bagianya sendiri dalam pengelolaan bangunan cagar budaya dan mempunyai wewenang sebagai pelaksana kebijakan

didalam pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya berdasarkan SK No 430/Kep 356-Disbudpar/2012 tentang Tim Cagar Budaya Kota Bandung.

3. Staf seksi kebudayaan sebagai tim pelaksana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang mempunyai pemahaman dalam pelaksanaan pengelolaan bangunan cagar budaya di Kota Bandung yang dimana mempunyai tugas untuk penelitian, pengkajian dan pemantauan terhadap bangunan cagar budaya
4. Anggota Panguyuban Bangunan *herritage* Kota Bandung yang mempunyai fungsi sebagai pembantu pemerintah Kota Bandung untuk ikut mengawasi, mendata mengenai bangunan cagar budaya di Kota Bandung mana saja yang dapat dikategorikan sebagai kategori A, B, maupun C yang hasilnya dilaporkan kepada WaliKota Bandung
5. Pemilik bangunan cagar budaya Rumah Seni Rohpi Kota Bandung sebagai orang yang menguasai bangunan cagar budaya dimana diatur dalam Perda Kota Bandung No. 19 Tahun 2009 Bab V pasal 9 bahwa pemilik wajib memelihara kelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya.

3.2.3 Teknik Analisa Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Artinya, untuk analisis data tidak dipergunakan model uji statistik dengan memakai rumus-rumus tertentu, melainkan lebih ditujukan sebagai tipe penelitian deskriptif. Kutipan hasil wawancara dan observasi sejauh mungkin akan ditampilkan untuk mendukung analisis yang disampaikan, sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu

kesimpulan dari hasil penelitian. Teknik analisa data yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai strategi penyelidikan yang naturalistis dan induktif dalam mendekati suatu suasana (setting) tanpa hipotesis-hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Teori muncul dari pengalaman kerja lapangan dan berakar (grounded) dalam data (Bagong Suyatno, 2005:183).

Hasil analisis data penelitian ini akan menjadi dasar dalam menarik kesimpulan dan menyampaikan saran sebagai masukkan bagi objek penelitian. Sugiyono (2009: 439) menyebutkan bahwa "Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data display, dan *conclutions drawing/virification*. Langkah analisis tesebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data) yaitu data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya yang berhubungan dengan Perda mengenai bangunan cagar budaya Kota Bandung. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian data) yaitu dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori mengenai kebijakan Perda No. 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya Kota Bandung. Penyajian data demikian dikarenakan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing/Virification* (Penarikan kesimpulan) yaitu langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan validitasnya dengan konsisten, sehingga kesimpulan dibuat merupakan kesimpulan yang kredibel.

Teknik analisis data di atas merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam analisis data hasil penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menjamin agar hasil penelitian implementasi kebijakan Perda No.19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya di Kota Bandung. teruji dan melahirkan kesimpulan yang bersifat ilmiah.

3.2.4. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan menggunakan

teknik yang tepat, maka akan diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai segi.

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Menurut Bungin (2008: 198) triangulasi adalah metode penggabungan yang dikenal dengan istilah *"mixed-method"* yaitu metode campuran di mana metode kuantitatif dan kualitatif digunakan bersama-sama di dalam suatu penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2010: 330) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada..

Dalam penelitian ini variasi teknik yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber. Hal ini dilakukan karena pengambilan data dalam penelitian menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi yang dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai obyek penelitian yaitu Kota Bandung terkait dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya. khususnya di instansi pemerintah Kota Bandung yaitu :

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
   Alamat : Jl. A. Yani No. 277
   Tlp. 022-7271724; Fax. 7210768;
   Website: www.bandungtourism.com
   Email : info@bandungtourism.com

2. Beberapa bangunan cagar budaya yang di pilih berdasarkan tujuan penelitian di beberapa titik di Kota Bandung.

Waktu penelitian dilakukan selama 5 bulan yaitu mulai bulan Februari – July 2014 dengan jadwal sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Jadwal Penelitian

No	KEGIATAN	TAHUN 2014																						
		Pebruari				Maret				April				Mei				Juni				Juli		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	Pengajuan Judul																							
2	Observasi Awal																							
3	Penyusunan UP																							
4	Seminar UP																							
5	Pengumpulan Data																							
6	Pengolahan Data																							
7	Analisis Data																							
8	Penyusunan Skripsi																							
9	Sidang Skripsi																							